

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pejabat/
pegawai karena masa purna tugas Kepala Bagian
Pengelolaan Barang Milik Negara per 31 Mei 2018,
sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan
Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang
Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun
2018 tentang Koordinator Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II
Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN
DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT KERJA ESELON II TAHUN
ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 43 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT KERJA
ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Satriyo Wibowo	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Angga Fariz Prayoga	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Kurnia Sari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Mukti Herlambang	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		8. Rasmita Juliana Sitepu	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		9. Andi Darmawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
		10. Lailatul Mufarokah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
		11. M Hanif Firnanda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
		12. Adi Afrianto	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
		13. Lulu Haryani	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
		14. Doddy PAscal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
		15. Verawaty Simorangkir	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
		16. Rizky Arimawati	Pusdiklat	300.000
		17. Dwi Hendri Cahyadi	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
		18. Edi Kristiyanto	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
		19. Astri Erviana	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
		20. Taufikurrohman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
		21. Sazzali	Inspektorat	300.000

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA